

Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing, Pendapatan Asli Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Sumatera Barat

Mohd Syafiq¹, Maizul Rahmizal²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: mohsyafiq2408@gmail.com, maizul.rahmizal@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

24 Juni 2026

Disetujui:

1 Juli 2026

Terbit daring:

15 Juni 2026

DOI: -

Sitasi:

Syafiq, M & Rahmizal, M. (2026). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing, Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Abstract:

Regional inequality is a common phenomenon in the economy, arising from variations in the quality of natural resources and demographic conditions in each region. Inequality in West Sumatra showed a significant increase between 2007 and 2023. This study aims to determine whether the variables of Foreign Investment, Regional Original Income, and the Human Development Index have an influence on Regional Inequality in West Sumatra Province. The method used in this analysis is multiple linear regression. The type of data analyzed is secondary data compiled by BPS (Central Statistics Agency) in the form of a time series. From the results that have been studied, it is revealed that the variables of Foreign Investment, Regional Original Income, and the Human Development Index show a positive influence, but do not have a significant impact on regional inequality in West Sumatra Province.

Keywords: Foreign Investment, Local revenue, Human Development Index, Regional Inequality.

Abstrak:

Ketimpangan wilayah merupakan fenomena yang sering ditemui dalam perekonomian, hal ini muncul dari variasi kualitas sumber daya alam serta keadaan demografi di setiap daerah. Ketimpangan yang muncul di wilayah Sumatera Barat menunjukkan kenaikan yang signifikan antara tahun 2007 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor variabel Penanaman Modal Asing, Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah regresi linear berganda. Jenis data yang dianalisis adalah data sekunder yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dalam bentuk time series. Dari hasil yang telah diteliti terungkap bahwa variabel Investasi Asing, Pendapatan Asli Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh positif, tetapi tidak memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Wilayah.

Kode Klasifikasi JEL:

PENDAHULUAN

Ketimpangan wilayah adalah isu yang dihadapi oleh semua negara termasuk di tingkat desa, kabupaten/kota dan provinsi, bahkan antar pulau di Indonesia. Kesenjangan ini terjadi tidak terlepas dari keanekaragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia antar daerah. Keanekaragaman tersebut di satu sisi dapat menjadi keunggulan tapi sayangnya di sisi lain berpotensi meningkatkan ketimpangan yang terjadi.

Ketimpangan wilayah dalam suatu negara atau suatu daerah merupakan hal yang cukup krusial untuk diselesaikan, karena dapat menimbulkan dampak negatif antara lainnya adalah inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan soladiritas serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya menggambarkan ketidakadilan (Todaro, 2003).

Menurut Sjafrizal (2008) ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakmerataan antar daerah: (i) variasi dalam potensi sumber daya alam yang berdampak pada output produksi suatu wilayah; (ii) perbedaan aspek kependudukan yang mempengaruhi efisiensi kerja

penduduk di suatu; (iii) adanya hambatan dalam pergerakan barang dan jasa; (iv) aktifitas ekonomi yang terfokus di satu lokasi; (v) serta perbedaan dalam distribusi dana pembangunan antar daerah.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan di daerah. Jhingan (1993) menyatakan bahwa ketidakseimbangan yang terjadi di suatu daerah disebabkan oleh besarnya backwash effect yang ditimbulkan dibandingkan dengan dampak sebar. backwash effect atau dampak balik yaitu berupa investasi yang mengakibatkan ketidakseimbangan yang lebih besar diantara daerah satu dengan yang lain. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan daerah antara lain angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia (Todaro, 2006).

Berdasarkan faktor penyebab ketimpangan wilayah, pandangan kaum Neo Klasik menunjukkan bahwa ketimpangan muncul karena setiap wilayah memiliki sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi yang tidak sama. Perbedaan ini menghasilkan variasi dalam kemampuan masing-masing daerah untuk mendorong proses pembangunan. Hal mengakibatkan terjadinya perbedaan antara daerah maju dan daerah terbelakang (Harun, 2012). Ketimpangan wilayah di Indonesia dapat pula diakibatkan oleh ketimpangan pada ketersediaan infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam konteks ini, infrastruktur berperan sebagai salah satu faktor dalam proses produksi yang dapat meningkatkan produktifitas marjinal pada hasil akhir, dimana infrastruktur yang baik dan sesuai dapat memfasilitasi berbagai aktifitas ekonomi melalui kemampuannya dalam memperlancar proses produksi serta mobilitas individu, barang dan layanan. Di sisi lain, perbedaan dalam kemampuan finansial antara wilayah dapat diukur melalui jumlah pendapatan daerah dan kualitas pengeluaran daerah. Kedua faktor tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi suatu daerah. (BPS, 2013).

Pembangunan ekonomi yang tidak merata umumnya terjadi karena proses pembangunan daerah hanya bergantung pada mekanisme pasar. Pertumbuhan ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar cenderung malah memperburuk ketidakmerataan pembangunan di berbagai wilayah. Kenyataannya, aktifitas dan kemajuan ekonomi lebih terfokus pada wilayah tertentu. Di sisi lain, di wilayah lain hanya terlihat ketertinggalan yang semakin mendalam. Ketimpangan wilayah adalah perbedaan dalam kondisi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi di satu daerah lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain serta perbedaan dalam infrastruktur dan sarana social ekonomi yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Syafrizal (2008) menyatakan bahwa ketimpangan wilayah adalah perbedaan kemampuan setiap daerah dalam memfasilitasi proses pembangunan yang diakibatkan oleh perbedaan dalam faktor sumber daya alam dan kondisi demografi di masing-masing daerah.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami isu ketidakmerataan wilayah adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi ini sedang berada dalam proses pembangunan di berbagai sector perekonomian saat ini. Ketimpangan wilayah di Sumatera Barat dapat dianalisis melalui indikator atau indeks ketimpangan wilayah, salah satu diantaranya indeks Williamson.

Tabel 1 memperlihatkan kemajuan indeks Williamson di Sumatera Barat antara tahun 2007 hingga 2023 beserta faktor-faktor yang diduga berpengaruh. Dari tabel ini, terlihat bahwa ketidakmerataan wilayah di Sumatera Barat menurut indeks Williamson mengalami kenaikan dari tahun 2007 hingga 2023, namun mengalami penurunan antara tahun 2022 hingga 2023. Peningkatan ketimpangan wilayah di Sumatera Barat diduga disebabkan oleh berbagai faktor yang berperan. Faktor-faktor yang dicurigai mempengaruhi dalam studi ini mencakup penanaman modal asing, pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia. Dalam tabel tersebut, tampak bahwa antara tahun 2007 hingga 2023, penanaman modal asing, pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia menunjukkan peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya. Dari hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa ketimpangan yang terjadi di wilayah di Provinsi Sumatera Barat dalam periode penelitian secara umum menunjukkan peningkatan. Ketimpangan yang muncul dianggap disebabkan oleh kelemahan atau kurang efektifnya pendekatan yang selama ini digunakan untuk menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat dan sesuai untuk menangani ketidakmerataan pembangunan agar kesenjangan ini benar-benar dapat diminimalkan.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Williamson, Penanaman Modal Asing, Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2023

Tahun	Indeks Williamson	Penanaman Modal Asing	Pendapatan Asli Daerah	Indeks Pembangunan Manusia
2007	0.2946	1,403,201,466,100	621,607,519,300	72.23
2008	0.2643	201,560,399,040	790,087,767,747	72.96
2009	0.2578	217,414,485,360	739,747,093,000	73.44
2010	0.2581	161,660,660,880	1 006 820 947 269	73.78
2011	0.2578	574,254,173,270	1,147,303,770,000	74.28
2012	0.2565	811,870,045,670	1,225,466,022,712	74.70
2013	0.2568	1,437,850,665,090	1,366,178,102,000	75.01
2014	0.2572	351,417,343,900	1,729,222,284,040	69.36
2015	0.2588	535,013,638,560	1,876,733,122,800	69.98
2016	0.2609	1,056,643,773,000	1,964,148,975,800	70.73
2017	0.2634	2,604,908,829,600	2,134,010,519,500	71.24
2018	0.2660	2,579,469,319,900	2,275,090,068,590	71.73
2019	0.2687	2,220,176,520,900	2,328,432,873,680	72.39
2020	0.3047	1,836,744,975,000	2,528,472,797,870	74.29
2021	0.3079	977,382,400,000	2,551,899,163,310	74.56
2022	0.3103	1,495,571,872,000	2,851,966,014,890	75.16
2023	0.3086	1,871,775,310,500	2,783,511,043,880	75.64

Sumber : BPS, Sumatera Barat, 2025 (Data Diolah)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif induktif dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari data ketimpangan wilayah berupa pdrb perkapita dan jumlah penduduk, data penanaman modal asing, data pendapatan asli daerah, dan data indeks pembangunan manusia. Sumber data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) antara tahun 2007 hingga 2023. Dalam analisis ketimpangan wilayah digunakan nilai indeks Williamson (Fahma & Mulyo Hendarto, 2022), rumusnya adalah:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \frac{P_i}{P}}}{Y}$$

Sesuai dengan rumus diatas dapat diuraikan, bahwa IW adalah Indeks Wolliamson, Y_i menunjukkan Pdrb perkapita di kabupaten/kota i , Y adalah Pdrb perkapita di provinsi, P_i adalah total populasi di kabupaten/kota i dan P adalah total populasi di tingkat provinsi.

Hasil analisis menggunakan teknik indeks Williamson di atas adalah bersifat relatif, di mana jika nilainya bertambah (mendekati 1), maka ketimpangan akan semakin jelas atau sangat

tidak seimbang. Sebaliknya, jika nilainya berkurang (mendekati 0), maka ketimpangan akan menjadi kecil atau lebih merata ($0 < IW < 1$) (Yuliadi, 2012:9).

Penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik analisis linear berganda. Untuk menganalisis penelitian ini menghubungkan model analisis linear berganda dimana untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun perumusan model regresi linear berganda adalah:

$$KW_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPMA}_t + \beta_2 \text{LogPAD}_t + \beta_3 \text{IPM}_t + e \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana, simbol KWt (Y) adalah Ketimpangan Wilayah, simbol β_0 adalah Konstanta, simbol PMA (X1) adalah Penanaman Modal Asing, simbol PAD (X2) adalah Pendapatan Asli Daerah, simbol IPM (X3) adalah Indeks Pembangunan Manusia, simbol β (1,2,3) adalah Koefisien regresi masing-masing variabel independent, simbol e mewakili nilai kesalahan, sedangkan simbol t menunjukkan waktu dalam konteks deret waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis Regresi linear Berganda. Dari hasil pengolahan data menggunakan Eviews 12 memperlihatkan hasil estimasi pengaruh penanaman modal asing, pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel. 2 Hasil Estimasi Pengaruh Penanaman Modal Asing, Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan manusia terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Variable	Coefficient	std. Error	t- Statistic	Prob
C	-0.591474	0.30716	-1.9256	0.0763
LOGPMA	0.004977	0.00638	0.78062	0.449
LOGPAD	0.012964	0.01175	1.10344	0.2898
IPM	0.004986	0.00236	2.11337	0.0545

Sumber: Output Eviews 12 data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat dibuat model regresi dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0.591474 + 0.004977 \text{ Log PMA} + 0.012964 \text{ Log PAD} + 0.004986 \text{ IPM}$$

Hasil di atas menunjukkan bahwa penanaman modal asing memiliki dampak positif terhadap ketimpangan wilayah. Dengan koefisien PMA adalah 0.004977, hal ini menandakan bahwa jika terjadi kenaikan penanaman modal asing sebesar 1 persen maka ketimpangan wilayah akan naik sebesar 0.004977% dan sebaliknya. Ini berarti penanaman modal asing mempengaruhi ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Penanaman modal asing memberikan kontribusi positif terhadap ketimpangan wilayah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.004977.

Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan asli daerah naik sebesar 1 persen maka ketimpangan wilayah akan bertambah sekitar 0,012964% dan sebaliknya. Dengan kata lain,

pendapatan asli daerah memberikan kontribusi positif terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat.

Indeks pembangunan manusia memiliki dampak positif terhadap ketimpangan wilayah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.004986. Hal ini menandakan bahwa jika indeks pembangunan manusia berubah maka ketimpangan wilayah akan naik sebesar 1 persen dan sebaliknya. Ini berarti indeks pembangunan manusia memberikan kontribusi terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat.

Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Pada tabel 2 variabel penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.004977 dan nilai probabilitas sebesar 0.4490 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Sehingga hipotesis ditolak.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi PMA belum memberikan dampak yang optimal terhadap ketimpangan wilayah. Dalam pandangan Myrdal, dijelaskan bahwa pergerakan modal dan dorongan untuk memaksimalkan keuntungan cenderung memperlebar ketimpangan wilayah, dan temuan tersebut terbukti pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2007 hingga 2023. Menurut Myrdal, motif pencarian laba dapat mendorong pertumbuhan pembangunan hanya di daerah yang memiliki prospek laba atau keuntungan investasi yang tinggi, sementara daerah lainnya cenderung tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Didia (2016) yang menganalisis ketimpangan pembangunan dan menegaskan bahwa investasi tidak memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peran pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi di berbagai daerah kabupaten/kota masih memerlukan penguatan. Upaya tersebut penting mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ketidakmerataan pembangunan.

PMA tidak berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pembangunan Kawasan di Provinsi Sumatera Barat. Fenomena ini terjadi karena investasi bukanlah satu-satunya elemen kunci yang signifikan dalam mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, meskipun ada tren positif dalam investasi asing di Sumatera Barat. Penanaman modal di Provinsi ini masih terpusat pada beberapa lokasi dan belum merata di seluruh sektor. Selain itu, kesiapan daerah dalam memanfaatkan arus investasi juga belum optimal. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung kegiatan investasi turut menjadi tantangan yang menghambat pemerataan dan efektivitas penanaman modal. Terbatasnya akses dan konektivitas infrastruktur antar kawasan menjadi penghalang yang membuat investasi belum optimal. Infrastruktur fisik memiliki peran vital karena menjadi fondasi utama yang mendukung sektor industri dan aktifitas investasi di wilayah tersebut.

Penanaman modal asing menghasilkan perusahaan dari luar yang mampu menyerap tenaga kerja di daerah sekitar, sehingga tidak berpengaruh pada ketimpangan dalam pembangunan. Dalam konteks ini, para investasi tidak hanya memanfaatkan sumber daya manusia dilokasi investasi, tetapi juga melibatkan tenaga kerja dari daerah lain. Dengan demikian, investasi yang dilakukan pada suatu wilayah tidak hanya dirasakan dan berdampak pada kawasan tersebut, tetapi juga memberikan pengaruh pada wilayah-wilayah sekitarnya. Hal ini menyebabkan investasi tidak hanya meningkatkan pendapatan penduduk setempat, tetapi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan penduduk setempat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan masyarakat di daerah lain. Aktifitas investasi membuka peluang bagi masyarakat untuk memperluas kegiatan ekonomi secara berkelanjutan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan nasional

dan kemakmuran masyarakat. Seiring meningkatnya investasi yang diarahkan pada proses produksi barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja juga bertambah, sehingga dapat mendukung pemerataan pendapatan per kapita.

Penanaman modal asing tidak memberikan dampak langsung terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Namun, keberadaan penanaman modal asing membuka peluang bagi berbagai komponen ekonomi yang berpotensi mengurangi ketimpangan untuk memperkuat perannya dalam pembangunan, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam konteks perekonomian, peran pemerintah sangat penting melalui pengaturan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu meningkatkan minat para investor, antara lain melalui kemudahan perizinan investasi, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk berinvestasi dan mendorong distribusi investasi yang lebih merata di setiap daerah. Investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik suatu daerah melalui penyediaan infrastruktur seperti jalan, pasokan listrik, irigasi dan sarana transportasi lainnya, serta melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif, pemerintah melakukan kebijakan melalui pemberian kemudahan perijinan, perbaikan dan sistem layanan yang mudah, murah, cepat dan tepat. Selain itu, kebijakan investasi harus sejalan dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah. Pemerintah juga dapat melakukan pengembangan *digital investment promotion* serta pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota. Dalam rangka menarik investasi ke Provinsi Sumatera Barat, pemerintah aktif melakukan pengembangan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, kereta api, sektor kelistrikan, dan zona industri.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Laut et al. (2020), penelitian tersebut menunjukkan bahwa PMA tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Jawa selama periode 2008 hingga 2018. Para investor asing umumnya lebih memprioritaskan berinvestasi di provinsi yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi. Alasan di balik hal ini adalah tingginya daya beli masyarakat yang menciptakan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan besar dan mendapatkan pengembalian investasi dalam waktu singkat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Pada tabel 2, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah dengan nilai signifikansi sebesar 0,2898 dan memberikan dampak positif. Dari angka tersebut, dapat dibilang bahwa PAD tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan wilayah karena skor signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis yang diajukan ditolak.

Hal ini diduga karena PAD hanya terkonsentrasi di daerah kaya, daerah yang sudah maju (misal kota besar) biasanya memiliki basis ekonomi kuat, memiliki sektor industri, jasa dan perdagangan sehingga PAD-nya tinggi. Sebaliknya, daerah tertinggal cenderung bergantung pada transfer dari pusat dan memiliki PAD kecil. Akibatnya, PAD justru memperlebar, bukan mengurangi ketimpangan, karena daerah kaya makin bisa membiayai pembangunan, sementara daerah miskin tetap tertinggal.

Hal ini diduga juga karena peningkatan potensi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana secara optimal, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap berada pada level terendah. Jika realisasi PAD tetap rendah, itu mencerminkan rendahnya kemandirian daerah yang mengakibatkan kesulitan dalam menangani masalah

pembangunan, termasuk ketimpangan wilayah. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Saptono, dkk (2022), yang menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut penelitian Saptono, dkk (2022), meskipun terjadi peningkatan pada PAD, hal ini tidak berpengaruh pada ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan dan pemerataan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan di seluruh daerah. Penelitian lain yang menghasilkan temuan serupa adalah penelitian oleh Ardana (2018), dimana PAD juga tidak memperlihatkan dampak yang berarti terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Pada tabel 2, variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan dampak yang positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Ini terlihat dari koefisien yang berjumlah 0.004986 dan nilai probabilitas sebesar 0.0545 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, hipotesis tersebut ditolak.

Hal ini duga peningkatan IPM di suatu daerah sering terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau daerah maju. Sementara daerah tertinggal tetap memiliki IPM rendah akibatnya, secara agregat IPM meningkat tetapi disparitas antarwilayah juga ikut naik, sehingga hubungan dengan ketimpangan menjadi positif. Kenaikan IPM tersebut lebih mencerminkan peningkatan kualitas hidup elit (urban) daripada pemerataan sehingga ketimpangan wilayah justru bertahan atau meningkat karena daerah yang tertinggal makin tertinggal.

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ersad (2022) dimana IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian selatan. Karena di Sumatera Bagian Selatan sektor yang paling besar berkontribusi terhadap PDRB adalah sektor pertanian, kemudian diikuti sektor pertambangan dan diurutan ketiga adalah sektor industri, dalam kegiatan produksi ketiga sektor tersebut tidak membutuhkan pekerja dengan IPM tinggi namun dalam kegiatan produksi sektor tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar, sehingga tingkat IPM tidak mempengaruhi pendapatan perkapita di Sumatera Bagian Selatan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Penanaman modal asing tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat. (2) Pendapatan asli daerah juga tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat. (3) Indeks pembangunan manusia tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan belanja pemerintah untuk keperluan produktif, seperti pengembangan Kawasan usaha strategis, yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi sebagai bekal pembangunan. Dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan para investor akan tertarik untuk melakukan investasi di berbagai wilayah, khususnya di area yang masih minim perhatian investasi. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, berupaya menumbuhkan minat investor agar berinvestasi di Sumatera Barat, khususnya di kabupaten atau kota yang masih rendah tingkat investasinya. Mengingat adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat mengarahkan kebijakan dengan strategi yang efektif yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperhatikan aspek pemerataan distribusi pendapatan. Pendekatan ini diwujudkan dengan memperluas akses terhadap modal dan kesempatan kerja,

sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil yang berpihak pada masyarakat berpendapatan menengah ke bawah termasuk UMKM. Pada saat yang sama, kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. Sumatera Barat Dalam Angka. 2019-2023. Bps Sumatera Barat: Sumatera Barat.
- B. A. Fahma, and R. M. Hendarto, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2020," *Diponegoro journal of Economics*, vol. 11, no. 2, pp. 76-81, jun. 2024. <https://doi.org/10.14710/djoe.33164>
- Didia, Khoir Akfini. 2016. "Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur". *Economic Development Analysis Journal*, 5(1).
- Ersad. (2022). Dampak IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Bagian Selatan, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol.17, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>
- Harun, Maski. (2012). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Jhingan, M.L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Baduouse Media.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Todaro. 2006. "Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga." Jakarta: Erlangga.